

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN**

Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi-Komisi di DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi di seluruh Indonesia yang obyek kunjungannya berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas masing-masing Komisi. Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar negeri & Intelijen, Komunikasi dan Informatika dalam reses masa persidangan II Tahun Sidang 2009 – 2010 melaksanakan kunjungan kerja dimana salah satu Provinsi yang dikunjungi adalah Provinsi Jawa Timur.

Dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur, Komisi I DPR RI memfokuskan kunjungan pada kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di daerah berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi serta memfokuskan pula pada Industri Strategis Pertahanan Nasional di Provinsi Jatim dalam upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI. Adapun maksud dan tujuan kunjungan adalah dalam rangka menggali informasi mengenai Provinsi Jawa Timur dan permasalahan yang dihadapi, serta permasalahan/kendala yang dihadapi Mitra Kerja Komisi I DPR RI yang bertugas di Provinsi Jawa Timur. Temuan/permasalahan dari hasil dari kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi I DPR RI agar dapat segera ditindaklanjuti guna mencari solusi penyelesaian dan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

### **B. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 107A/PIMP/II/2009-2010 tanggal 18 Februari 2010 dan dilaksanakan pada tanggal 22 – 26 Maret 2010.

### **C. ANGGOTA TIM**

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI dengan komposisi keanggotaan Tim terdiri dari : 11 (sebelas) orang Anggota Komisi I DPR RI, 2 (dua) orang Sekretariat, 1 (satu) orang Staf Ahli, 1 (satu) orang TV Parlemen DPR RI dan beberapa penghubung Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI.

Adapun daftar nama Tim Kunker Komisi I DPR RI sebagai berikut:

1. H. Hayono Isman, SIP	F-PD	Ketua Tim
2. Mirwan Amir	F-PD	Anggota Tim
3. H. Tri Tamtomo, SH	F-PDI Perjuangan	Anggota Tim
4. Ir. Dadoes Soemarwanto, M.Arch	F-PDI Perjuangan	Anggota Tim
5. Luthfi Hasan, SH	F-PKS	Anggota Tim
6. Prof. Ismet Ahmad	F-PAN	Anggota Tim
7. Mohammad Nadjib	F-PAN	Anggota Tim
8. H. Ahmad Daeng Gd. Sere	F-PPP	Anggota Tim
9. H. Amin Suparmin	F-PPP	Anggota Tim
10. DR. H. Effendi Choirie, MH	F-PKB	Anggota Tim
11. Ahmad Muzani	F-Gerindra	Anggota Tim
12. Suprihartini, SIP		Sekr. Tim
13. Suparno		Sekr. Tim
14. Agus Royadin		TV.Parl DPR
15. Begi Hersutanto, MA		Staf Ahli

## **BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

### **A. SELAYANG PANDANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Provinsi Jawa Timur secara geografis berada diujung timur Pulau Jawa dengan jumlah penduduk ±40 juta jiwa merupakan jumlah populasi penduduk nomer 3 terbesar di Negara Kesatuan republik Indonesia. Wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 wilayah Kabupaten/Kotamadya dan merupakan provinsi yang memiliki ketahanan pangan yang dapat diandalkan untuk sektor Nasional kecuali kedelai dengan persentase ±70% minus, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap kondisi umum setempat.

Dampak dari perkembangan lingkungan regional maupun nasional sebagai implikasi dari perkembangan high teknologi tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Jatim, baik ditinjau dari aspek kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya hingga kepada masalah ketahanan nasional didaerah terkait dengan masalah keamanan serta ketertiban masyarakat. Hal ini dapat dicapai karena perangkat kemuspidaan setempat mulai dari tingkat provinsi hingga pada tingkat Kabupaten/kotamadya bahu membahu dengan organisasi kelembagaan yang berada didaerah dalam mengelola wilayah Provinsi Jawa Timur, terlebih dalam mengatasi riak-riak yang timbul akibat dari perkembangan politik nasional dan hal tersebut dapat diatasi dengan melalui pendekatan persuasif serta manusiawi sehingga celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain tertutup dihati masyarakat setempat.

### **B. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAMIKA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

Secara umum, kondisi Provinsi Jawa Timur berada pada situasi yang kondusif, baik dibidang ekonomi, politik, dan keamanan. Di bidang ekonomi, Provinsi Jawa Timur mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5,01%, dimana kondisi tersebut ditopang oleh sektor ekspor dan impor, serta tingginya intensitas aktifitas perdagangan antar pulau. Di bidang ketahanan pangan, Provinsi Jawa Timur berada pada kondisi yang baik, dimana ketersediaan berbagai komoditi bahan pangan strategis berada pada kondisi yang mencukupi. Namun, kondisi tersebut tidak meliputi kondisi ketersediaan kedelai yang dirasakan masih belum mencukupi.

Kondisi makro ekonomi Provinsi Jatim digambarkan pada kondisi yang baik, dengan tingkat inflasi berkisar 3,62%. Terkait dengan tingkat inflasi tersebut, tingkat inflasi yang oleh indikator makro ekonomi dianggap memiliki kecenderungan sebagai tingkat inflasi yang tinggi, namun di sisi lain kondisi stabilitas pasar justru berada pada kondisi yang baik, dimana antara supply dan deman mengalami keseimbangan yang baik.

Lebih lanjut, situasi kondusif kondisi ekonomi makro Provinsi Jawa Timur tersebut ditunjang oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka yang pada saat sekarang ini tingkat pengangguran berada pada kisaran 23,4%. Penurunan tingkat pengangguran tersebut salah satunya disebabkan oleh karena adanya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peningkatan intensitas dan aktifitas dari sektor UMKM juga mengalami peningkatan yang signifikan. Namun di saat yang bersamaan, dari seluruh keberadaan aktifitas UMKM yang ada, hanya sekitar 30% dari

keseluruhan aktifitas UMKM Provinsi Jawa Timur yang memiliki akses terhadap sistem pembiayaan perbankan yang disebabkan oleh berbagai kendala teknis pengajuan kredit atau pinjaman yang diterapkan oleh sektor perbankan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pemda tingkat Provinsi telah mengupayakan inisiatif pelaksanaan lembaga penjaminan oleh Pemda.

Berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan, sampai dengan saat sekarang ini, kondisi stabilitas politik di Provinsi Jawa Timur berada pada situasi yang kondusif. Berbagai gejala dan potensi terjadinya demonstrasi oleh elemen-elemen masyarakat yang menyatakan kritik atas berbagai kebijakan pemerintah nampaknya berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui langkah-langkah dialog dan langkah-langkah persuasif dan menghindari langkah-langkah kekerasan dalam menghadapi gejala demonstrasi. Masyarakat kerap kali diingatkan bahwa kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban berkontribusi secara langsung terhadap kondisi kesejahteraan secara umum.

Temuan menarik terkait dengan kondisi keamanan Jawa Timur yang kondusif adalah pihak Gubernur beserta jajaran Muspida mengembangkan dan menerapkan forum pertemuan reguler yang bersifat informal antara jajaran Pemda dengan berbagai unsur aparat keamanan seperti Polda Jatim, dan jajaran Kodam V Brawijaya, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Saat ini Provinsi Jawa Timur tengah bersiap-siap untuk melangsungkan Pilkada di berbagai daerah. Berbagai pihak tengah mempersiapkan diri dalam rangka untuk menghadapi pesta demokrasi tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang transparan secara tertib dan aman. Secara demografis, perbandingan antara pertumbuhan populasi penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berkembang dengan sangat baik. Namun disadari pula masih terdapatnya beberapa daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang perlu untuk mendapatkan perhatian.

Adapun permasalahan lain yang cukup serius dihadapi oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur adalah berkaitan dengan kurangnya ketersediaan pupuk untuk menunjang kegiatan dan peningkatan kualitas pertanian yang ada. Pemerintah Daerah Provinsi Jatim tengah melakukan berbagai upaya terobosan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

### **C. HASIL PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI di bidang Pertahanan, Intelijen, Komunikasi dan Informasi, berbagai temuan yang terkait dengan jajaran mitra kerja Komisi I DPR RI di Provinsi Jawa Timur dapat disampaikan sebagai berikut :

#### **I. BIDANG PERTAHANAN**

Dibidang Pertahanan, kunjungan difokuskan pada tema :

1. Peran Kodam V/Brawijaya selaku Kotama Operasional Pembinaan dalam mendukung terciptanya Pembangunan Nasional di Daerah.
2. Peran Armatim beserta jajarannya dalam menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah Laut Yuridiksi Nasional
3. Peran PPRC dalam mendukung Tupoksi TNI untuk mengamankan, menyelamatkan, mengawal dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.
4. Peran Industri Strategis Pertahanan Nasional dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI.

Secara umum, kondisi satuan-satuan TNI di Provinsi Jawa Timur mengalami keterbatasan jumlah dan kualitas Alutsista, keterbatasan dukungan logistik dan kesejahteraan prajurit, keterbatasan ketersediaan munisi sebagai bekal pokok dan bekal latihan, keterbatasan sarana, fasilitas, frekuensi latihan, dimana kondisi-kondisi tersebut merupakan akibat langsung dari terbatasnya alokasi APBN untuk bidang pertahanan.

Terkait dengan upaya untuk memerangi tindak terorisme, berbagai pihak dalam jajaran satuan TNI mengemukakan permasalahan sehubungan dengan ketidakjelasan aturan melibatkan TNI dan POLRI dalam upaya memerangi terorisme. Di Provinsi Jawa Timur terdapat setidaknya berbagai satuan TNI yang juga memiliki kemampuan anti teror, selain dari DENSUS 88 POLRI, yang diantaranya meliputi: 4 Batalyon Raider/Kodam V Brawijaya, satuan Kopaska, satuan Pasmar, Denjaka, Bravo, dan Linud 18 Kostrad.

Disadari bahwa berbagai satuan-satuan yang ada memiliki kekhususan kemampuan untuk memberantas terorisme, yang apabila seluruh sumber daya tersebut disinergikan dengan peranan POLRI, tentunya akan menghasilkan suatu kekuatan yang signifikan dalam menghadapi ancaman terorisme.

Peran TNI untuk dapat terlibat dalam upaya menghadapi ancaman terorisme telah diwadahi dalam peranan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Undang-Undang No.34 tahun 2002. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada aturan pelaksanaan yang dapat menjadi dasar hukum bagi melibatkan TNI. Kondisi tersebut di lapangan dirasakan menjadi masalah bagi satuan-satuan TNI di lapangan, mengingat di satu sisi disadari akan tugas dan peranan yang diemban oleh POLRI, namun di sisi lain, disadari pula bahwa kemampuan satuan-satuan tersebut juga memiliki keahlian untuk menghadapi ancaman terorisme, yang apabila disinergikan secara keseluruhan akan meningkatkan efektifitas dalam upaya menghadapi ancaman terorisme.

## **1. MATRA DARAT :**

### **a. KODAM V/BRAWIJAYA**

Kodam V/Brawijaya selaku Kotama operasional dan selaku Kotama pembinaan merupakan Kompartemen strategis yang berada di Wilayah Provinsi Jatim dengan kekuatan personil yang dimiliki berjumlah ±30.212 Prajurit dan ±4.209 PNS, tersebar di 4 Korem, 33 Kodim, 577 Koramil dan wilayah ini terdapat 169 pulau yang kesemuanya tidak berpenghuni. Dalam melaksanakan TUPOK nya Kodam V/Brawijaya didukung oleh berbagai satuan yang dimilikinya al: satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan badan pelaksana serta unsur pelayanan lainnya. Kondisi pangkalan Kodam V/ brawijaya saat ini memiliki 8087 unit Rumah Dinas GOL I dan 2666 unit RUMDIN GOL II, bila dikaitkan dengan jumlah personil yang ada Satuan ini masih kekurangan 17.908 Unit RUMDIN, ironisnya hingga saat ini banyak RUMDIN GOL II masih dihuni oleh para purnawarawan 920, Wakawuri(477) dan yang tidak berhak menghuni sebanyak 154 unit, sedangkan prajurit aktif yang tertampung sebanyak 1155 unit.

Dibidang alutista terdapat beberapa permasalahan yang masih sangat menonjol, baik yang digunakan oleh prajurit di jajaran satuan tempur, bantuan tempur serta badan pelaksana, al sbb:

- 1) Senjata ringan jenis pistol yang siap operasional hanya 34 %
- 2) Senjata ringan jenis PM yang siap operasional hanya 17%
- 3) Senjata MO ringan dan sedang yang siap operasional hanya 50%
- 4) Senjata Mer 105 mm/(Tarik USA 1940, 18 Cuk) siap operasional 50%
- 5) Senjata Mer 57 mm/Hanudse (Rusia 1962, 32/36 Cuk, 1/3 RR/RB siap 58%
- 6) Tank Amx 13/Perancis 1963 (52 unit, 16RB), siap 60%
- 7) Panser pengintai Feret-saladin-sarasin/Inggris 1960 7,5,6 , siap 20%

Selain senjata dan kendaraan tempur, maka kendaraan angkut personil yang tersedia dimasing-masing satuanpun masih perlu untuk mendapatkan perhatian antara lain sebagai berikut:

- 1) KOTER (Korem-Kodim), 0 % ( Truck  $\frac{3}{4}$  Ton )
- 2) SATPUR Yonif- brigif, 60% ( Truck  $\frac{3}{4}$  Ton )
- 3) BANPUR kendaraan penarik Mer berfungsi untuk angkut personil dengan kondisi memprihatinkan. Selain senjata dan kendaraan tempur, alat berat yang dimiliki satuan Zeni tempur menjadi perhatian, karena saat ini satuan zeni tempur terlibat dalam melaksanakan tugas Civil mission serta rehabilitasi daerah dalam rangka melaksanakan tugas perbantuan kepada Pemda, namun kesiapan yang dimiliki hanya 22 % (Buldozer-Exavator-Dozer-Mine Detector dan Metal Detector).

Demikian juga dengan alat pendukung sukses tugas seperti alat komunikasi / alat hubungan yang tersedia di satuan dengan ragam jenis, kacina-motorolla- PRC 77-PRC 107, hanya siap 40 %.

Kegiatan OMSP yang dilakukan oleh Kodam V/ Brawijaya sesuai dengan UU No 34/ 2004 tentang TNI dilaksanakan dalam upaya menciptakan kemandirian TNI-Rakyat-Polri dan berupaya melaksanakan banter, binlingkungan secara rutin agar pembangunan didaerah dan penciptaan kondisi keamanan didaerah tercipta dengan baik, adapun bentuk kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) melaksanakan operasi TMMD skala kecil maupun berskala besar (lapindo).
- 2) Melaksanakan pengamanan terhadap objek vital nasional ( PT Pindad Turen )
- 3) Melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri dalam Pilkada dan Riot.
- 4) Pelayan KB bersama BKKBN didaerah yang memiliki pencapaian rendah.
- 5) Kerjasama dengan Pemda melaksanakan renovasi terhadap RTLH untuk warga miskin.
- 6) Program penanaman sejuta pohon diberbagai wilayah secara serentak.
- 7) Ikut serta melaksakan program pemberantasan buta aksara latin dengan memanfaatkan satpur- banpur serta koter setempat untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

- 8) Melaksanakan program kesehatan masyarakat (bibir sumbing, Hernia, pengobatan umum dan gigi).

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki Kodam V/Brawijaya mampu menjabarkan pokok-pokok keinginan dan intruksi dari komando atas dan dari keterbatasan tersebut Kodam mampu menjalin kebersamaan dengan muspida Jatim serta elemen masyarakat lainnya, sehingga tercipta kondisi kondusif di daerah. Beberapa permasalahan lainnya antara lain :

- 1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan profesionalisme keprajuritan dan kesiapan satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya AGHT secara tiba-tiba, maka amunisi BP (bekal Pokok) yang tersedia di gumarah dan satuan pemakai harus (3&1), dan kondisi saat ini masih kurang mencukupi
- 2) Index amunisi latihan yang seharusnya dan telah ditetapkan sebanyak 250 butir/tahun/orang tidak terpenuhi dengan baik dan yang tersedia hanya 48 butir (12) butir/tw
- 3) Penjabaran tentang OMSP dalam upaya memerangi aksi terorisme dirasakan tidak memberikan ruang kepada satuan TNI yang memiliki kemampuan khas matra dan hal ini dapat menimbulkan kecemburuan, oleh karenanya UU no 34/2004 tentang TNI pada kolom penjelasan tersebut perlu untuk disempurnakan
- 4) Latihan bersama antar matra dengan pihak kepolisian perlu ditingkatkan sesuai dengan Sisbinlat yang terukur.

Dalam kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Tim juga meninjau gelar kesiapan yonif 500/ Raider. Satuan Yonif 500/Raider ini merupakan satuan PMK yang handal dan dari DSPP serta Top yang ada kesemuanya mendekati 100 %. Namun bila ditinjau secara cermat terhadap kesiapan operasional lebih khusus dari jenis senjata bantuan yang dimiliki yaitu M081 (alat bidik rusak) berikut amunisi exercise yang tidak mendukung untuk latihan sering kering kurang, demikian tipe jenis senjata bakduk dengan amunisi latihan yang terbatas dan senjata serbu yang digunakan oleh perorangan ada kerusakan divisir dan pejera serta senjata kelompok minim dengan jumlah amunisi terbatas akan berpengaruh langsung terhadap kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas pokoknya dilapangan. Dalam rangka mendukung tugas kepolisian menghadapi aksi terorisme, satuan ini sangat siap dengan PJD nya serta ketrampilan pendukung lainnya dapat beroperasi secara aktif dengan tugas perburuan tersebut namun perlu menjadikan perhatian mengenai amunisi latihan untuk perorangan dengan 48 butir/tahun/perorangan dirasakan kurang, demikian dengan MU BP yang tersedia di satuan dirasakan mengawatirkan.

## **b. BRIGIF LINUD/DIVISI II/KOSTRAD**

Divisi II/Kostrad saat ini menyanggah tugas sebagai satuan PPRC pusat menggantikan divisi I/K dan dari penjelasan yang disampaikan oleh panglima divisi menyatakan bahwa Brigif Linud 18/K dalam operasinya selalu bersifat terintegrasi melaksanakan pembinaan potensi dirgantara serta mendayagunakan dukungan operasi bagi satuan lainnya guna meniadakan ancaman demi untuk menjaga, mengawal, mengamankan dan menyelamatkan keutuhan bingkai NKRI.

Linud 18 merupakan satuan khusus yang terdiri dari Satgas Darat, Satgas Laut dan Satgaskorud yang memiliki kemampuan penyerbuan, pemukul dan sekaligus kemampuan anti teror.

Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki satuan Brigif/Linud 18 telah sesuai dengan DSPP dan TOP, namun bila ditinjau dari allapor, allapsus dan allapendukung operasional lainnya, maka beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian sebagai berikut :

1. Al Kapur
  - a. Senjata perorangan SS visirnya bergeser bila telah melakukan penembakan.
  - b. Payung MCII, yang digunakan mendekati usia usai masa pakai.
  - c. Bekal tiga hari bama pengadaan satuan (supermi-beras-lilin lapangan) dan hal ini sebaiknya didukung dari Babek TNI T1,T2, dan Konservent
  - d. MU BP telah memenuhi standar yaitu 250 butir, namun, untuk latihan sangat terbatas.
  - e. TP/GLM yang berada disusunan RU tidak merata (SS-2).
  - f. Prapos Yang seharusnya melekat di perorangan belum dibagikan.
2. Alat Perlengkapan Khusus
  - a. Senjata Bakduk SPR I amunisi latihan sangat terbatas dan berpengaruh pada ketrampilan prajurit
  - b. Alat komunikasi perorangan-pleton-kompi, PRC 77-HT terbatas dan cukup tua.
  - c. Payung barang cenderung habis masa pakai.
3. Senjata Bantuan dari Sat Banpur
  - a. MO 81 amunisi latihan terbatas dan kaliberasi tidak pernah dilakukan sehingga berpengaruh terhadap jarak dan perkenaan terhadap sasaran.
  - b. Arhanudse, senjata penangkis serangan udara impor dan munisi terbatas masa pakainya
  - c. Rudal Jirafjumlah senjata siap operasional berkurang dan MU yang tersedia kadaluarsa.
  - d. Panserintai dan APC ex perancis highcause.
4. Keterampilan prajurit
  - a. BDM, adopsi dari beberapa cabang beladiri, Yumo/Korea melekat diprajurit
  - b. PJD untuk mengatasi tempur anti terorisme professional namun program latihan antar matra dan kepolisian belum merujuk pada SysBinLat yang benar, egosektoral masih menonjol.

5. Kemampuan angkut satuan PPRC oleh satuan udara berat TNI AU dalam waktu singkat siap menerbangkan 1 SSK dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan operasi maka bila ditinjau dari ad 1s/d5 kondisi ancaman yang mungkin timbul bila dihadapkan dengan kemampuan yang dimiliki untuk menuntaskan hal tersebut beberapa saat dan akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai.
6. Terkait dengan upaya untuk memerangi terorisme, Linud 18 memiliki kemampuan khusus dalam anti teror, namun memiliki kesulitan dalam berperan memerangi terorisme, mengingat belum jelasnya dasar hukum bagi aturan pelibatan TNI.

## **2. MATRA LAUT**

### **a. TNI AL ARMADA TIMUR**

Komando Armada Kawasan Timur bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan diwilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi dan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kormatim didukung oleh personil dengan jumlah 18.894 orang dan personil PNS dengan jumlah 2069 orang yang tersebar di 7 Lantamal serta di Makoarmatim yang tersebar di wilayah kawasan timur, yaitu Surabaya, Makasar, Kupang, Bitung, Ambon, Jayapura dan Merauke.

Kondisi Koarmatim saat ini dalam rangka menghadapi tugas yang semakin tidak ringan tersebut memiliki alutsista yang sebagian besar telah berusia diatas 25 tahun dan kekuatan dimaksud terdiri dari berbagai jenis kapal antara lain 83 KRI/31 Siap, 2/KAL/siap dan 123 Palkamla/Siap, walaupun dengan keterbatasan alutsista yang dimiliki masih mampu melakukan berbagai bentuk operasi laut OMP maupun OMSP dan dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan kelautan dilaut tersebut TNI AL Armatim melaksanakan pembinaan terhadap kekuatan yang dimiliki diarahkan pada upaya mempertahankan struktur kekuatan tersebut melalui optimalisasi pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan skala prioritas dengan system rotasi 30 % siap operasi, 30 % siap di pangkalan, dan 40 % siap sebagai pendukung. Untuk mendukung kelancaran tugas yang dimaksud, Koarmatim memberdayakan 7 Lantamal yang ada dengan fungsi menyediakan dukungan fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, dukungan fasilitas perbekalan dan fasilitas perawatan bagi personil.

Dengan melihat kepada kondisi geografis maupun kemampuan yang dimiliki masih ada celah yang dapat digunakan oleh pihak lain dan hal ini menjadi potensi ancaman terhadap pelanggaran hukum dilaut, antara lain:

- a. Masih terjadi upaya penyelundupan senapan dan bahan peledak dari Filipina selatan.
- b. Penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia di kepulauan Arulaut Banda dan perairan papua.
- c. Imigran gelap dari NTT yang ingin mendapatkan suaka di Australia.
- d. Pembajakan dan perompakan terhadap kapal niaga di Selat makasar.



Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kebocoran pengawasan di daerah tertentu diperlukan adanya penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana material khusus termasuk intelijen disemua lintasan agar penginderaan dini dapat tercapai, perlu peningkatan secara kuantitas pengawasan terpadu dengan unsur Bea Cukai dalam upaya pengawasan keluar masuk barang di pelabuhan dan untuk mendukung hal ini diperlukan dukungan penambahan anggaran untuk operasional dan kegiatan intelijen serta penambahan alutsista.

Beberapa temuan lain yang diperoleh Tim, antara lain :

1. Untuk mendukung logistik kelancaran kegiatan dan operasi, TNI AL/Armada Timur masih menghadapi kendala tidak memungkinkannya supply BBM dari Pertamina pada hari minggu dan pada hari-hari libur lainnya. Akibat dari kondisi tersebut merubah pola operasi, dan menjadi sangat riskan ketika terjadi krisis atau bencana.
2. Dalam visi ke depan, jajaran Armada Timur memberikan masukan, mengingat akan luasnya wilayah kerja TNI AL/Armada Timur dihadapkan pada perkembangan ancaman dan tantangan kondisi lingkungan strategis yang ada, idealnya gelar kekuatan TNI AL tidak lagi terbagi atas wilayah armada timur, dan wilayah armada barat, melainkan terbagi atas Armada I yang meliputi wilayah perairan Indonesia Barat, Armada II yang meliputi wilayah perairan Indonesia tengah, dan Armada III yang meliputi wilayah perairan Indonesia Timur. Dengan demikian, kondisi lingkungan strategis wilayah perairan Indonesia yang memiliki 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dapat ter-cover seluruhnya.
3. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI juga menemukan adanya perkembangan baru tentang penambahan 4 kapal jenis Cygma yang memperkuat jajaran Armada Timur (Armatim) , serta adanya upaya pembangunan kekuatan jajaran Armatim untuk membangun kemampuan peperangan kepulauan yang didukung oleh kapal-kapal cepat yang dipasang rudal buatan Cina (C-705). Terkait dengan penggunaan rudal tersebut, pihak Cina bersedia untuk melakukan alih teknologi sampai Indonesia mampu untuk membuat.
4. Kedepan, kapal-kapal fiber idealnya tidak lagi dipakai mengingat akan masa pakai kapal-kapal fiber tersebut berkisar antara 7 sampai dengan 10 tahun.
5. Untuk mendukung pembangunan kekuatan pertahanan di masa depan yang didukung oleh kemandirian industri strategis pertahanan, TNI AL berharap agar PT.PAL mampu mendukung kebutuhan tersebut. Kenyataannya sekarang akibat adanya pemberlakuan Keppres No.80 tahun 2004, PT.PAL sering kali mengalami kekalahan dalam mengajukan tender. Untuk itu diharapkan agar pemerintah dapat memberlakukan pengecualian pada pemberlakuan Keppres tersebut terhadap BUMNIS/BUMNIP yang ada. Lebih lanjut, hendaknya PT.DI untuk mampu melakukan pembuatan pesawat udara maritim dengan assistance dari pihak TNI AL.

**b. PASUKAN MARINIR 1/PASMAR 1**

Dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan *OpsRatFib*, *OpsHantai*, *operasihantai* pulau terdepan serta operasi tempur lainnya, kesatuan ini memiliki kekuatan yang cukup besar yaitu 12027 personil aktif yang tersebar pada unsur Komando Markas, *Brigif I*, *Konkav I*, *Menarsi I*, *MenBanpur.I*, *Yon Taefib.I* dan *Yonmar Hanlan*, maka dengan semboyan dan sesanti "YalesuBhumyamka Yayamahe" Kopasamar I berupaya secara optimal untuk menguatkan satuan dalam jajarannya untuk siap digunakan ke wilayah tanggung jawabnya diseluruh kawasan Indonesia bagian timur pada kesempatan pertama dan sebagai satuan operasional maka kedudukannya langsung dibawah KSAL.

Kondisi Alutsista satuan Pasukan Marinir 1 ditinjau dari sisi kuantitas telah memenuhi standard yang diharapkan, namun bila ditinjau dari sisi kualitas maka perlu untuk dicermati secara seksama baik senjata kelompok, senjata bantuan serta BanTem dari unsur BanPur serta amunisi pendukung yang tersedia untuk disikapi dan ditindak lanjuti dengan mengadakan penggantian maupun penambahan, agar siaga oprasional dapat menjadi siap oprasional yang benar dan dapat diandalkan setiap saat, dan NKRI terjaga dari disintegrasi bangsa.

Untuk melaksanakan tugasnya Pasmars I berpedoman kepada UU TNI no 34/2004, tentang TNI dan dalam kegiatannya siap untuk melaksanakan OMSP, hal ini ditunjukkan oleh Pasmars I dalam memberikan bantuan perkuatan operasi kepada POLRI (penanganan RIOT/UNRAS, pengamanan Pilkada, dan kesiapan penanggulangan terorisme di daerah yang belum optimal), demikian juga bantuan terhadap Pemda Jatim yaitu kesiapan Satgas Bencana Alam didaerah.

Dalam perjalanan kedepan untuk menghadapi AGHT yang lebih kompleks sifatnya, maka ada hal – hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian antara lain sebagai berikut:

- a. Senjata tanpa tolak balik yang usia pakai cukup tua dan amunisi yang tidak tersedia dan Latpil yang kurang, menyarankan agar senjata tersebut diganti atau ditarik
- b. Senjata Bantuan M081 perlu perlu di keliberasi mengingat usia pakai serta amunisi latihan dan BP yang tersedia kurang mencukupi, sebaiknya diganti /diperbaiki dan perlu ditambah
- c. Senjata bakduk (Travelo/afsel/2 cuk/2009) sebaiknya diganti dengan SPR 15 Pindad mengingat peralatan sangat terbatas dan sangat sulit
- d. Pemberdayaan kemampuan Taifib belum diberdayakan untuk giat membantu tugas kepolisian memerangi aksi terorisme perlu penyesuaian UU, sebab satuan ini memiliki kemampuan operasi kusus dan sebagai unsur penindak Gultor serta memiliki ketrampilan pendukung khusus yaitu terjun bebas menyelam dan komando, namun satuan ini belum

memiliki alapsus standard pasukan khusus ( kapor, senjata Daewoo/Korea bukan standard TNI)dan perlengkapan yang saat ini digunakan adalah bekal dari satuan "Denjaka". Ransum tempur yang melekat di anggota Sebaiknya natura jenis t1/t2/Konservent dan untuk tiga kali bekal sebaiknya di satuan.

### **3. MATRA UDARA**

#### **a. PANGKALAN TNI AU ABDULRAHMAN SALEH**

Koorps TNI AU II mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya dan melaksanakan pembinaan potensi dirgantara serta mendayagunakan dukungan operasi bagi satuan lainnya.

Dalam rangka mendukung sukses tugas maka Lanud Abdurrahman saleh mempunyai kekuatan pendukung yaitu sebagai berikut:

1. LANUD Amdulrahman Saleh merupakan LANUD Tipe A yang memiliki squadron tempur, squadron angkut, dan satuan depo, dimana secara umum terdapat adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang diantaranya meliputi belum tersedianya Run Up area, kondisi General and Special Tools yang sangat terbatas, belum tersedianya shelter pesawat C-212, dan belum tersedianya mobil VCP Skadron
2. Skadron udara 4 yang mengoperasikan pesawat C-212 Casa dengan kemampuan antara lain:
  - a. Melaksanakan intai taktis
  - b. Pemindahan personil dan barang yang diterjunkan/didaratkan.
  - c. SAR terbatas
  - d. Kesiapan pesawat C-212 Casa, 6 dialokasikan dan 2 nyata, permasalahannya dukungan suku cadang terbatas.
3. Skadron udara 32-angkut berat , yang dalam tugasnya mengoperasikan pesawat Hercules C-130 Tipe B,H dan BT dengan kemampuan antara lain;
  - a. Pemindahan Personil / barang dengan diterjunkan/didaratkan.
  - b. Evakuasi medis udara.
  - c. VVIP / VIP
  - d. Persiapan Pesawat C-130, B, H, dan BT, 8/BH dan 2 BT regata 3 BH dan 1 BT, permasalahannya dukungan suku cadang sangat terbatas dan beberapa instrument Albnau Pesawat belum di kolaborasi
4. Skadron Udara 21 Tempur taktis, yang mengoperasikan pesawat OV.10 Bronco dengan kemampuan antara lain :
  - a. Serangan udara langsung.
  - b. Patroli udara bersenjata.
  - c. Penyekatan udara.
  - d. Kesiapan pesawat OV 10 Bronco, 4 dialokasi dan 2 nyata, permasalahannya gGrounded sejak 04 oktober 2007 dan disiapkan bila keadaan darurat dan terpaksa, sambil menunggu pesawat pengganti.
5. Kegiatan Operasi yang dilaksanakan walaupun kemampuan terbatas, adalah operasi pengamanan perbatasan, operasi laut, operasi udara, operasi SAR dan operasi bantuan (TNI.Polri, dan Pemda).

6. kekuatan dan kemampuan wing II PaskKhas dan batalyon 464 PasKhas, mempunyai tugas melaksanakan pertahanan pangkalan/alutsista/instalasi TNI AU, Dalpur, Daludpan, Satuan tempur, Serta operasional lainnya sesuai dengan kebijaksanaan panglima TNI, dengan kemampuan yang dimiliki antara lain; melaksanakan tugas-tugas pengendalian udara depan dan melaksanakan persiapan dropping zone, pengendalian terjun serta mengendalikan bantuan dan persiapan satuan Den Bravo melaksanakan tugas perbantuan kepada kepolisian Negara terhadap aksi terorisme di daerah.

Permasalahan, Allapsus untuk Dalpur dan Dallapan, parachute Free fall sudah habis masa pakainya, Senjata SS, Den Bravo buatan Daewoo/Korsel tidak nyaman (perkenaan bidik, tekanan dan amunisi yang tersedia minimal, sehingga berpengaruh terhadap volume latihan), demikian juga terhadap Alkom yang tersedia jenis "HF/SSB" untuk pelaporan darat, udara tidak tersedia

7. Kesiapan Lanud Abdurahman Saleh dalam rangka mendukung PPRC dan SRC-PB, sebagai satuan pelaksana operasi udara untuk mendukung kedua operasi tersebut bila dihadapkan kepada kesiapan pesawat intai (C-212) dan pesawat angkut berat C-130 B/H/HT, bila dilaksanakan pada saat/waktu yang bersamaan terhadap 2 trouble spot yang berbeda menjadi sangat riskan dan memerlukan kecepatan prioritas mana yang harus dipilih. (jumlah pesawat, kondisi pesawat, kecepatan dan bentuk AGAT).

Tindakan dan saran Berpedoman kepada kondisi nyata di lapangan Lanud Abdurahman Saleh dalam rangka mendukung operasi untuk sukses secara umum belum mengalami peningkatan yang berarti baik secara kuantitas maupun secara kualitatif. Oleh karena itu disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu penambahan kekuatan bagi sarana angkatan udara baik jenis/hercules maupun C-212-Cassa.
- b. Pesawat pengganti OV-10 BRONCO segera kedatangannya dipercepat.
- c. Suku cadang dan jenis pesawat yang saat ini tersedia, sebaiknya dilengkapi dengan suku cadang yang memadai untuk menjaga kesiapan operasional setiap saat.
- d. Alat VCP pangkalan udara Abdurahman Saleh seyogjanya dipenuhi.

## **II. INDUSTRI STRATEGIS PERTAHANAN NASIONAL**

### **A. PT. PAL**

Visi serta misi yang dicanangkan PT PAL dengan high tech serta SDM yang dimiliki berjuang untuk merancang, merakit, membangun dan memproduksi berbagai jenis kapal, baik kapal niaga, kapal perang dengan berbagai jenis serta alat lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri, jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal.

PT PAL dan industri strategis pertahanan nasional lainnya diharapkan dapat menjadi industri pertahanan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Adapun kondisi riil PT. PAL saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) selama lebih dari 10 tahun terakhir ini PT PAL mengalami kesulitan keuangan yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut mampu menguras modal perusahaan dan saat ini sedang berupaya mencari pinjaman dari pihak ke III.
- 2) Biaya over head lebih besar dari pemasukan sehingga terjadi deficit/bulan.
- 3) Pembatalan kontrak oleh pihak pembeli menambah besar hutang di Bank.
- 4) Hal-hal teknis lainnya dan masalah manajemen intern.

Dampak dari kondisi nyata tersebut bila tidak ada uluran tangan dari pemerintah untuk menutup celah yang dialami ini, niscaya PT PAL Indonesia menunggu pailit. dari pada menuju kejayaan industri strategis maritim, hal ini dikarenakan dalam waktu dekat akan terjadi perampangan/PHK terhadap karyawan sebanyak 900/orang guna mengurangi beban perusahaan.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada PT PAL Indonesia untuk memproduksi kapal perusak, kapal rudal/PKR, landing ship lend/LST serta alih teknologi dalam rangka pembangunan kapal selam. Namun ditengah keterbatasan produksi karena masalah modal kerja, pihak Daewoo Korsel memberikan apresiasi dengan menyatakan bahwa produksi dan karya PT PAL Indonesia mempunyai kualitas yang baik, sedangkan disisi lain, Kemhan RI menyatakan bahwa produksi PT. PAL masih perlu peningkatan. Hal ini merupakan pernyataan yang kontradiksional serta merugikan kemampuan industri strategis dalam negeri itu sendiri.

Oleh karena itu dalam rangka mendukung persiapan PT PAL Indonesia untuk melakukan pengembangan industri pertahanan dari produk yang dikuasai menjadi produk yang dikembangkan, maka perlu dilakukan penyelesaian kemelut/kendala yang terjadi diperusahaan dengan cara melakukan berbagai tindakan, antara lain:

a. Masalah internal:

- 1) Pendekatan masalah keuangan dengan cara mendapatkan suntikan dari pemerintah.
- 2) Memperbaiki manajemen dan kinerja.
- 3) Perbaikan serta aktualisasi masalah teknologi.
- 4) Produksi harus kompetitif
- 5) Diperlukan kebersamaan untuk menghapus pajak/meringankan.

b. Masalah eksternal :

- 1) Persaingan produksi sejenis dengan luar negeri (yang dibiayai KE)
- 2) Belum ada dukungan KEPRES/ UU yang mendukung industri pertahanan.
- 3) pembebanan PPN untuk galangan kapal, sementara untuk pembeli dibebaskan.
- 4) Pendanaan untuk alutsista dalam negeri masih langka dan mahal.
- 5) instruksi dari pemerintah untuk memberdayakan, memanfaatkan hasil industri pertahanan dalam negeri sebagai alutsista TNI.
- 6) Adanya revisi terhadap pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003 yang memungkinkan pemperian prioritas kepada aktivitas Industri Strategis Pertahanan Nasional.

## **B. PT. PINDAD DI TUREN**

PT. Pindad mampu memenuhi kebutuhan dasar alutsista jajaran TNI sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk senjata perorangan, senjata kelompok, senjata regu hingga senjata bantuan baik jenis lintas datar maupun lintas lengkung dan pengadaan kendaraan tempur/rantis ringan lainnya hingga pengadaan penggandaan amunisi cadangannya.

Kemampuan yang dimiliki divisi munisi pabrik bekerja selama 24 jam/hari/3sip dan jenis amunisi yang dihasilkan antara lain MKK, MKB dan amunisi khusus 9MM, 5,56MM, 7,6MM. 12,7 MM, demikian juga untuk jenis granat tangan serta mortir, kapasitas produksi dalam satu tahun cukup memberikan dukungan untuk amunisi satuan-satuan TNI. Ditinjau dari kapasitas produksi yang demikian besar, justru penjualan dan pembelian dari dalam negeri kecil.

Kendala yang dihadapi PT. Pindad saat ini, antara lain

1. Komposisi SDM walaupun berlebih namun kekurangan tenaga ahli.
2. Modal kerja berasal dari pinjaman bank dan bukan subsidi dari pemerintah
3. Belum tersedia industri hulu mendukung alutsista (metal khusus, high explosive dsb)

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung operasional PT. Pindad, antara lain :

1. Kemhan/TNI sebagai pengguna alutsista diwajibkan untuk memesan dan membeli alutsista yang bersifat rutin, seperti, munisi, senjata ringan dari Pindad.
2. Proses pesanan kebutuhan alutsista diawali dengan pemberian uang muka dan seterusnya yang dilakukan dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pesanan.
3. Pemerintah memberikan dukungan subsidi untuk menutup hutang yang ada dan memberi modal kerja dengan perjanjian yang mengikat kepada PT Pindad.

## **III. BIDANG KOMINFO**

Dibidang Komunikasi dan Informatika, kunjungan difokuskan pada tema :

1. Peranan dan kontribusi PT. Telkom dalam mendukung pembangunan telekomunikasi di Provinsi Jawa Timur
2. Peranan dan kontribusi PT. POS dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur
3. Pemberdayaan LPP TVRI dan LPP RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik di daerah dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jatim.
4. Peranan lembaga penyiaran dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jatim

Adapun hasil kunjungan kerja sebagai berikut :

### **a. PT. TELKOM**

Dalam upaya mendukung pembangunan telekomunikasi di Provinsi Jatim, PT. Telkom telah mampu menjangkau 1005 wilayah di Provinsi Jatim yang terdiri dari 38 kabupaten/Kota, dimana jenis alat komunikasi seperti telepon, speedy, flexy, yes TV telah terlayani hingga tingkat kecamatan dan desa. Hal ini menandai bahwa masyarakat menyadari akan makna sarana alat komunikasi tersebut memiliki arti penting dalam mendukung kebutuhan pembangunan fisik / nonfisik dan dari sektor ini Provinsi

Jatim menerima kontribusi pajak sebesar 13,01 % dari PAD, dan sebagai wujud kepedulian telkom daerah terhadap masyarakat setempat, maka telkom daerah merajut kerjasama kemitraan serta melaksanakan pembangunan lingkungan di 924 kegiatan antara lain diarahkan untuk sektor pendidikan dan BLC ( Broadband learning Center) diseluruh wilayah Jatim, namun untuk mendukung program kegiatan lebih berdaya guna efektif diharapkan agar Pemda dapat memberikan kemudahan untuk memberikan izin serta roadmap tentang industry telekomunikasi di indonesia dengan pembangunan infrastruktur yang merata,

**b. PT Pos Indonesia**

PT. Pos Indonesia merupakan perusahaan jejaring dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan terbesar di wilayah NKRI dan di Propinsi Jatim PT Pos Indonesia mampu melayani kebutuhan masyarakat hingga ketinggian pedesaan dalam bentuk surat, weselpos maupun kartu pos. Hal tersebut masih diminati oleh masyarakat karena tarif jasa relatif murah dan terjangkau serta penduduk mudah untuk mendapatkan layanan tersebut.

Namun dengan perkembangan lingkungan yang terjadi, terlebih dengan kemajuan pesat bidang High tech dibidang komunikasi, maka terjadi inefisiensi operasi, hal ini disebabkan oleh SDM yang tersedia dan peralatan kerja dan telah berumur diatas 40 tahun berjumlah 50 % dari pegawai yang tersedia dan peralatan kerja telah usang. Khusus dalam menunjang produktivitas proses manual yang tersedia lamban adanya, kondisi ini berpengaruh langsung terhadap pengendalian sistem yang ada sehingga untuk berkompetisi penuh dengan jasa lain ketinggalan dan demikian juga dengan sinerginitas antar pelayanan/operator pos terkendala, hal ini berpengaruh terhadap penggunaan biaya operasional dilapangan, terlebih dengan diberlakukannya UU No 8 Tahun 2009 Tentang POS, dari berbagai aspek kebijakan yang diberlakukan berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan karyawan dan hal iniyang perlu untuk mendapatkan perhatian dan pertimbangan dari pemerintah tentang high light jauh dekat berbiaya murah serta harga perangko yang diberlakukan sejak tahun 1980 hingga saat ini belum pernah dinaikkan oleh pemerintah, oleh karenanya PT POS Indonesia perlu untuk direformasi.

**3. LPP TVRI JATIM**

LPP TVRI Jatim dengan usia yang telah menginjak 32 tahun dan beroperasi sejak tahun 1978 mengudara selama 4/5 perhari dan memiliki 34 mata acara dengan komposisi berita dan informasi 45 %, pendidikan dan Agama 20 %, serta hiburan 35 % untuk menyelenggarakan program dimaksud TVRI Jatim didukung oleh 20 satuan transmisi yang tersebar diberbagai daerah sebagian diantaranya mengalami kerusakan (ringan/sedang/berat), dan untuk program kegiatan TVRI Jatim didukung oleh perangkat dalam yaitu antara lain 3 studio yang kondisinya memerlukan perhatian, agar tayangan berkualitas juga untuk menopang hal tersebut dibutuhkan peralatan produksi luar studio antara lain untuk bidang berita, bidang program dan hal tesebut diperlukan adanya penataan terhadap SDM, fasilitas pendukungnya. Dengan kondisi yang ada diharapkan untuk masa mendatang, diperlukan pengadaan/penggantian alat yang telah usang agar berdaya

saing dengan TV swasta dan dengan kemelut yang terjadi pada pusat TVRI daerah tidak menginginkan adanya peleburan satu atap dengan RRI demikian juga dengan system rekrutmen SDM.

#### **4. LPP RRI**

Dengan Visi Misinya RRI Jatim/Surabaya mampu memposisikan diri sebagai radio publik milik bangsa, independent, netral, berdiri diatas semua kepentingan dan golongan, memposisikan diri sebagai media perekat bingkai NKRI, didaerah dan didalam program penyelenggaraan siarannya RRI Jatim Surabaya menggunakan 4 (empat) program siarannya, antara lain: hiburan 35 %, pendidikan 15 %, berita/informasi 25%, iklan 15 %, dan siaran kebudayaan 10 %, dan hal ini dilakukan melalui kanal yang sudah disiapkan, terselenggaranya siaran ini diawasi oleh SDM yang berjumlah 241 orang (186 PNS/55 gatrak), jumlah tersebut digunakan untuk melayani sarana dan prasarana yang tersedia yaitu Pemancar FM dengan kondisi 50 % serta kendaraan operasional lainnya. Oleh sebab itu agar mutu/kwalitas siaran lebih baik lagi, diperlukan adanya perbaikan terhadap alat yang sudah usang, biaya untuk operasional dirasakan kurang dan perlu perhatian. penggantian terhadap pemancar yang terkena gangguan demikian juga dengan anggaran untuk mengikat tenaga kontrak dan statusnya perlu perhatian.

#### **5. KPI DAERAH JAWA TIMUR**

Pengawasan dan pengkajian internal kepada perijinan, uji publik, sanksi serta isi siaran radio dan televisi serta sosialisasi terhadap P3 dan SPS mengenai radio, televisi serta kanal yang digunakan. Didalam perjalanannya KPID Jatim memonitor dan merespons pengaduan yang diberikan oleh masyarakat, pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti manakala hal tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPID Jatim, dari hal singkat yang telah diutarakan tersebut ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah yaitu sebagai berikut; hubungankerja yang menyangkut dengan kebijakan KPI Pusat dgn KPID terhadap hal tertentu hendaknya desentralisasikan (perijinan, untuk penghematan keuangan Negara) perlu dilakukan strukturisasi organisasi dan tata kerja (KEEM), berkaitan dengan kemampuan terhadap pengawasan siaran KPID Jatim tidak memiliki alat untuk melakukan rekaman dan keterlibatan masyarakat sebagai mitra untuk berperan sebagai pemberi informasi belum optimal.

#### **6. BALAI MONITORING**

Balai Monitoring daerah Jatim, merupakan UPT (Unit Pelaksana teknis) Ditjen Postel dan KemKominfo yang bertugas antara lain melaksanakan pengamatan dan pendektasian terhadap sumber pancaran spectrum frekwensi radio, penertiban/penyidikan terhadap pelanggaran frekwensi radio serta pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dari gangguan frekwensi radio tersebut. Dari tugas dan fungsi yang digambarkan Badan Monitor ini sangat bermanfaat dalam rangka mendukung kelancaran tugas pelayaran dan penerbangan, system peringatan dini dalam penanggulangan bencana alam serta system pertahanan dan keamanan RI dan distribusi informasi, mengingat dengan kemajuan high tech yang



demikian pesatnya gangguan akibat frekuensi dapat menyebabkan terjadinya gangguan dan hambatan, hal ini bila dibiarkan menerus dapat mengakibatkan terjadinya bencana yang tidak diinginkan bersama, (Jamming, Sporews emisi, relokasi frekuensi dan sebagainya) oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya tantangan tersebut perlu penataan terhadap SDM, penataan alat monitor yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan jangkauan dalam upaya melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang terjadi, demikian terhadap reaksi dari pelayanan/pengaduan masyarakat dirasakan lamban dan perlu regulasi yang mendukung yang berisikan antara lain mengenai rekomendasi kelayakan berikut SOP penanggulangan gangguan terhadap STO kadaluarsa/bodong.

#### IV. **KUNJUNGAN KE PERUMAHAN TNI**

Dalam serangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Tim Kunker Komisi I berkesempatan untuk mengunjungi salah satu Rumdis TNI AL Seruni yang berlokasi di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pertemuan dihadiri perwakilan penghuni perumahan AD/AU dan Kepollisian Negara se wilayah Provinsi Jatim dan penghuni kompleks dengan metode tatap muka.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari angkatan dan purnawirawan Polri serta warakawuri dan anak, didapat informasi yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap kemelut yang hingar bingar secara arif serta bijaksana, sehingga momentum ini tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkompetent sebagai peluang dan kesempatan untuk berlindung pada tindakan penertiban ini, seolah olah mereka benar-benar yang teraniaya, terlupakan dan termarginalkan dan diperlakukan secara semena-mena dengan harapan ada kebijakan yang menguntungkan mereka dari pada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan rumah tersebut.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak ada ketegasan yang tersurat maupun tersirat secara jelas dan tegas dari menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI/TNI terutama tentang penghuni rumah Negara yang ditafsirkan bukan sebagai rumah dinas, sehingga mereka berhak untuk memelihara dan menempati serta memilikinya.
- 2) PP NO 40 mengisyaratkan bahwa para purnawirawan berhak menempati sampai dengan membeli rumah murah golongan III (Tiga).
- 3) Perumahan prajurit yang saat ini di dalam sebagai rumah Negara, sejak mereka masih berdinas aktif hingga purna, pemeliharaan segala pembayaran pajak dibayar oleh penghuni dan bukan oleh dinas, olehnya Pemeliharaan yang sudah dilakukan Berpuluh tahun, mereka berkehendak membelinya dan tidak menginginkan direlokasi/ dipindahkan (rumah tersebut sudah direnovasi).
- 4) Penghuni bersedia untuk ditertibkan bila mereka memiliki rumah lebih dari satu dan bagi mereka yang nyata nyata memiliki / menempati rumah Negara/dinas lebih dari satu bersetuju/ bersedia untuk ditertibkan demikian terhadap rekan mereka yang lain. Langkah tindakan penyelesaian yang diharapkan, mereka menghargai/ mengharap panja yang dibuat oleh Komisi I DPR RI dapat menyelesaikan

masalah secara komprehensif lebih cepat, agar rasa aman dan nyaman bagi penghuni tercipta

### **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Tim dapat menyimpulkan dan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Secara umum kondisi Provinsi Jawa Timur berada pada situasi yang kondusif, baik di bidang keamanan dan pertumbuhan ekonomi dengan didasari pemberdayaan industri kecil menengah yang mampu menyerap tenaga kerja, serta pencapaian stabilitas di bidang ketahanan pangan.
2. Forum kemuspidaan dalam mengelola wilayah Provinsi cukup kompak namun dampak dan pemahaman dari UU no.32/2004 tentang Otonomi Daerah disalah tafsirkan oleh beberapa pejabat di daerah, sehingga loyalitas semu masih terjadi (Kab/Kodya terhadap Propinsi) hal ini ditandai dengan kegiatan Musrenbang yang harus dihadiri oleh perwakilan muspida dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan, sehingga dalam mewujudkan yang akan diharapkan seperti RUTR/RUTR Pertahanan (wilayah pertahanan) serta kegiatan Kominda tidak konsekuen dilaksanakan. Untuk itu Kementrian Dalam Negeri perlu menata ulang UU no.32/2004 tentang OTDA dengan PP yang lebih bersifat teknis agar kepatuhan, loyalitas dan ketaatan terwujudkan.
3. Untuk kegiatan intelijen yang dimotori oleh Poswil BIN setempat kurang berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan pembentukan jaring dikelompok masyarakat tidak terbentuk dan tidak mengakar, sehingga dalam menentukan target masih merujuk pada rumusan katanya. BIN hendaknya perlu untuk meningkatkan kemampuan untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh dan akurat atas berbagai potensi ancaman yang ada sehingga intelijen dapat berfungsi lebih baik sebagai *early warning system* untuk mendukung pembuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta dapat berperan lebih aktif sebagai Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN), serta mendukung pemberdayaan dari Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
4. Di bidang Pertahanan, baik dari matra darat, matra laut, hingga matra udara yang menyangkut tingkat kesiapan satuan dasar hingga satuan yang lebih besar ditinjau dari aspek kapor, kapsat, kapsus, pilsus, tidak terintegrasi serta amunisi dan kemampuan angkut sat PPRC dirasa masih perlu dibicarakan ditingkat pengambil kebijakan karena hal ini sangat tidak relevan dengan kondisi pengembangan lingkungan terkait dengan AGHT. Dalam rangka mempertahankan kesiapan dan profesionalisme prajurit, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana latihan yang memadai. Untuk itu diperlukan langkah-langkah :
  - a. Kesatuan jajaran operasional saat ini gandrung kepada latihan PJD dalam rangka menghadapi ancaman aksi terorisme, sebaiknya latihan TPRAG tidak dikesampingkan dan tetap menjadi basis pengetahuan dasar petempuran satuan kecil.
  - b. LATMA antar MATRA dan Kepolisian RI dalam SysBinLat untuk melaksanakan latihan gabungan anti terorisme cenderung tidak spesipik KEMATRAAN, oleh karna itu perlu dibentuk wadah Nasional untuk hal tersebut dan langsung komando berada pada Presiden dengan kepanjangan tangan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI

- c. Amunisi yang tersedia disatukan sampai dengan Kotama sangat memprihatinkan, olehnya pemerintah memerintahkan agar PT PINDAD menjadi suplaier untuk pengadaan dalam negeri dan tidak dibenarkan KEMHAM dan Panglima TNI mengimport hal ini (Industri strategis mampu menyediakan kebutuhan/ perlengkapan perorangan untuk hal ini).
  - d. Senjata, alat komunikasi, MKK dan MKB hendaknya terintegrasi antar matra sehingga standarisasi ini mampu memperpanjang daya pakai serta kesatuan tindak yang diharapkan terjadi (keuangan Negara terjaga).
  - e. Pesawat angkut personil jenis Hercules, CASA serta helikopter angkut perlu menjadi prioritas, mengingat luas wilayah dan kecepatan tindak menjadi prioritas utama.
  - f. Untuk mengantisipasi ancaman, sebaiknya 3 ALKI dijaga pintu masuknya dengan penempatan LANTAMAL dan juga perlunya ditambah Armada Laut III ditingkat Indonesia bagian Timur
  - g. Perlu ditata ulang UU no 34/2004, tentang TNI mengenai OMSP, sebaiknya dilengkapi dengan PP yang mengatur aturan pelibatan, sehingga menjadi jelas bagi pelibatan satuan (matra) dan kepolisian Negara. Hal ini untuk mencegah terbentuknya rasa arogansi sektoral mengingat ancaman kedepan semakin kompleks bentuknya dan memerlukan penanganan secara bersama.
5. Sehubungan dengan upaya untuk mendukung kebutuhan alutsista, serta untuk mencapai tujuan kemandirian alutsista di masa depan, perlu adanya dukungan dan peran keberadaan BUMNIS/BUMNIP yang ada, seperti PT PAL dan PT PINDAD, dimana kedua badan tersebut memiliki kemampuan teknologi dan produksi serta SDM untuk mendukung Pengadaan alutsista bagi jajaran TNI dan POLRI. Namun karena kesalahan manajemen dan kondisi keuangan yang memprihatinkan, dan tidak adanya dukungan subsidi dari Pemerintah guna memberikan suntikan dana bagi operasionalisasi PT. PAL dan PT. PINDAD Turen dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Disamping itu PT. PAL dan PT. PINDAD Turen agar melakukan berbagai pengembangan Research and Development untuk menghasilkan produk-produk pertahanan yang berkualitas baik, sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti kebutuhan alutsista yang mampu mendukung mobilisasi pasukan ke seluruh wilayah NKRI dan kebutuhan munisi secara memadai.

Disamping itu perlu untuk dipikirkan kemungkinan untuk melakukan pembiayaan melalui sektor perbankan nasional. Dalam upaya pemberdayaan BUMNIS/BUMNIP, perlu dilakukan kajian mendalam yang memungkinkan agar BUMNIS/BUMNIP yang memiliki peran signifikan sebagai salah satu industri strategis pertahanan nasional berada dibawah pembinaan dari Kementerian Pertahanan.

6. Terkait dengan upaya untuk memerangi tindak terorisme, Tim Kunjungan Kerja Komisi I berulang kali mendapat masukan dari berbagai satuan TNI yang ada tentang keberadaan dan kemampuan satuan-satuan khusus TNI yang memiliki kemampuan anti-teror, namun perlibatan satuan-satuan tersebut terkendala oleh belum jelasnya aturan perlibatan yang ada. Sementara di sisi lain, pengembangan fungsi dan kemampuan anti-teror oleh TNI merupakan pelaksanaan dari Operasi Militer Selain Perang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2002 tentang TNI. Dengan adanya sinkronisasi dan sinergi atas berbagai kemampuan intelijen yang ada serta peranan sinergis antara satuan Detasemen 88 POLRI dengan berbagai satuan anti-teror yang dimiliki oleh TNI tentunya hal tersebut akan menciptakan efisiensi yang tinggi dalam upaya untuk memerangi terorisme. Untuk itu sudah saatnya untuk segera dipikirkan tentang kemungkinan untuk dilakukannya inisiatif pembahasan tentang tersedianya aturan-aturan perlibatan antara TNI-POLRI yang akan menjadi dasar pijak peraturan bagi TNI untuk melakukan perlibatan.

7. Sehubungan dengan penyelesaian berbagai permasalahan Rumah Dinas (Rumdis) di lingkungan TNI yang ditempati oleh pensiunan anggota TNI, Tim Kunker Komisi I DPR RI menemukan adanya indikasi berbagai aturan yang tumpang tindih di lingkungan TNI atas pengelolaan dan penggunaan Rumdis yang ada. Sementara di sisi lain, ditemukan juga berbagai kondisi di mana Rumdis yang ada tidak digunakan sesuai peruntukannya, dan oleh orang yang tidak berhak. Lebih lanjut, permasalahan Rumdis semakin mengemuka ketika satuan-satuan di lingkungan TNI melakukan penertiban perumahan dinas dengan menggunakan cara-cara yang dianggap tidak berperikemanusiaan, diantaranya melalui cara pengusiran dan intimidasi. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperlukan adanya penerapan aturan yang sama di seluruh lingkungan TNI terhadap pengelolaan dan penggunaan Rumdis yang ada, serta di sisi lain, pihak TNI hendaknya menghindari penggunaan langkah-langkah yang tidak sejalan dengan aturan hukum, serta menempuh pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Hal –hal tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Panja Aset Tanah di Komisi I DPR RI.
8. Pengaduan, jeritan, harapan, kemitraan jajaran KEMKOMINFO menyangkut dengan regulasi, kewenangan pengadaan, kesejahteraan rekrutmen pendanaan operasional serta pengadaan sarana prasarana lapangan dapat dipenuhi, sehingga gelar berita dan informasi mampu mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga bingkai NKRI terjaga dari perpecahan dan masalah.

Demikian laporan kunjungan kerja komisi I DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendapatkan masukan terhadap permasalahan yang terjadi di jajaran mitra kerja Komisi I DPR RI di daerah. Hasil kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Nasional.

Jakarta, 20 April 2010  
**KETUA TIM,**

**H. HAYONO ISMAN, S.IP**  
A-450